

Sebuah Alternatif: *Better Life Index* sebagai Ukuran Pembangunan Multidimensi di Indonesia

An Alternative: Better Life Index as a Measure of Multidimensional Development in Indonesia

Dody Pratomo^{a,**}, Bagus Sumargo^{b,*}

^aBadan Pusat Statistik Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara

^bProgram Pascasarjana, Universitas Negeri Jakarta

[diterima: 22 Januari 2016 — disetujui: 5 Desember 2016 — terbit daring: 3 Januari 2017]

Abstract

The purpose of this study is to get value-BLI Better Life Index as a measure of multidimensional development in Indonesia, and to analyze the relationship between BLI with the human development index HDI, regional development index IPR, and economic growth. BLI formation method through three stages: normalization, weighting, and aggregation. The results show that Indonesia's BLI is in the lower-middle class. Province of Jakarta, East Kalimantan, North Sulawesi, Riau and South Sumatra with the highest value of BLI. BLI size has a positive and significant correlation with IPM and IPR compiled by the BPS-Statistics Indonesia. However, BLI was a negative and significant correlation with economic growth.

Keywords: *Multidimensional of Development; Better Life Index; Human Development Index; Regional Development Index; Economic Growth*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan nilai *Better Life Index* (BLI) sebagai ukuran keberhasilan pembangunan di Indonesia, serta menganalisis hubungan antara BLI dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Regional (IPR), dan pertumbuhan ekonomi. Metode pembentukan BLI melalui tiga tahap: normalisasi, pembobotan, dan agregasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai BLI Indonesia termasuk kategori menengah bawah. Provinsi Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Riau, dan Sumatera Selatan dengan nilai BLI tertinggi. Ukuran BLI ini mempunyai korelasi yang positif dan signifikan dengan IPM dan IPR yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun demikian, BLI berkorelasi negatif secara signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: *Pembangunan Multidimensi; Better Life Index; Indeks Pembangunan Manusia; Indeks Pembangunan Regional; Pertumbuhan Ekonomi*

Kode Klasifikasi JEL: O15; O33

Pendahuluan

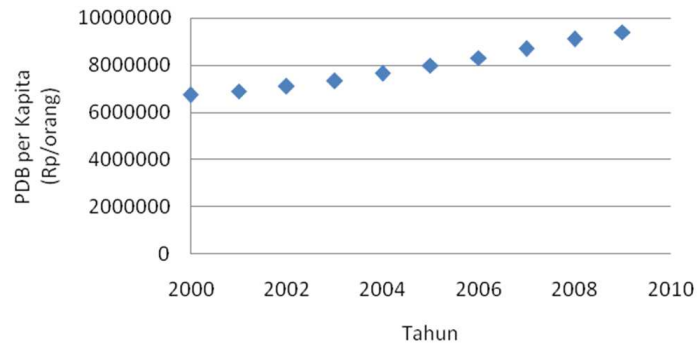
Pada berbagai negara, termasuk Indonesia, keberhasilan suatu pembangunan seringkali dilihat dari sisi pertumbuhan ekonominya, khususnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dalam hal ini PDB dan komponen-komponen sektoralnya merupakan dampak *intermediate* (Lisna *et al.*, 2013).

Setidaknya selama satu dekade ini, PDB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) 2000 Indonesia selalu mengalami kenaikan, bahkan persentase pertumbuhan PDB ADHK dari tahun 2001 sampai 2008 mempunyai tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2010, tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% dan 6,5% pada tahun 2011 dengan yang ditargetkan sebesar 6%.

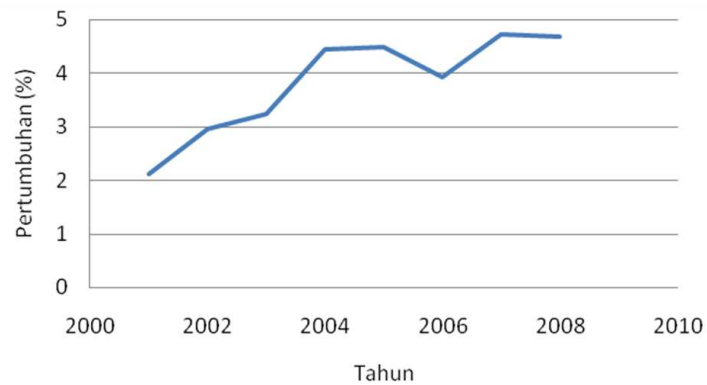
Dari segi ekonomi, keadaan Indonesia terlihat semakin membaik termasuk pemerataan pendapatannya pun mulai tampak keadaan yang relatif baik.

* Alamat Korespondensi: PPs UNJ, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220. E-mail: bagussumargo@unj.ac.id.

** E-mail: dodyp@bps.go.id.



Gambar 1: PDB per Kapita Indonesia ADHK 2000
Sumber: BPS (2010d, 2011), diolah



Gambar 2: Persentase Pertumbuhan PDB per Kapita Indonesia ADHK 2000
Sumber: BPS (2009a), diolah

Sesuai dengan data *Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)* BPS, nilai koefisien Gini Indonesia tahun 2010 menurun menjadi 0,33. Angka ini menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Indonesia berada dalam kondisi yang cukup merata (antara 0 sampai 0,4). Nilai koefisien Gini Indonesia menurun sejak tahun 2008. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2008 tingkat pemerataan pendapatan Indonesia semakin merata. Keadaan koefisien Gini Indonesia lebih baik dibandingkan negara-negara berkembang lainnya seperti India yang mempunyai koefisien Gini 0,4 dan negara-negara Amerika Latin juga mempunyai koefisien Gini yang cukup tinggi.

Angka-angka pada Gambar 1 dan 2 tentunya belum menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan yang lainnya. Telah diakui bahwa sebenarnya masyarakat telah lama menginginkan suatu ukuran kebahagiaan (sebagai hasil pembangunan), tidak hanya dengan uang tetapi juga mencakup dimensi kebahagiaan yang lainnya. Ukuran yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih dipandang sebagai catatan pelengkap saja. Di samping itu, dimensi IPM hanya mencakup dimensi pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada Mei 2011 mendeklarasikan suatu ukuran pembangunan yang disebut *Better Life Index (BLI)*. Indeks ini tersusun atas sebelas dimensi pembangunan yaitu dimensi perumahan, pendapatan, pekerjaan, kemasyarakatan, pendidikan, lingkungan, pemerintahan, kesehatan, kepuasan hidup, keamanan, dan keseimbangan waktu. Ide BLI adalah untuk mengukur lebih dekat hal-hal yang orang-orang pikir penting bagi mereka. Indeks ini pun disambut baik dan telah digunakan di puluhan negara anggota OECD. Indonesia yang merupakan negara berkembang yang mulai maju tentu sangat sesuai untuk menggunakan ukuran ini karena melihat pembangunan dari segi ekonomi saja pada saat sekarang sudah kurang relevan.

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mendapatkan suatu ukuran BLI sebagai ukuran pembangunan di Indonesia, mengetahui keberhasilan pembangunan dengan ukuran BLI di Indonesia secara nasional maupun provinsi, serta menganalisis hubungan antara BLI dengan IPM, Indeks Pembangunan Regional (IPR), dan pertumbuhan ekonomi.

Tinjauan Literatur

Pembangunan dan Indikatornya

Menurut Arham (2014), pembangunan merupakan proses transformasi yang ditandai oleh perubahan struktur, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, serta kelembagaan dan budaya (Badrudin, 2009). Pembangunan nasional dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi contohnya pertumbuhan yang cepat di sektor industri dan jasa sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan terhadap perolehan akses sumber daya ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, di samping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Menurut Todaro dan Smith (2004), pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multi-dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan pendapatan, dan mengentaskan kemiskinan. Pada hakekatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atas penyesuaian sistem sosial secara menyeluruh tanpa mengabaikan kebutuhan dasar dan keinginan individu maupun kelompok untuk mencapai kondisi spiritual dan material yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan, bahwa pembangunan pada intinya merupakan transformasi yang dilakukan secara sengaja dengan berbagai kebijakan terhadap banyak aspek secara total menuju arah yang lebih baik.

Pembangunan pada akhirnya adalah menciptakan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Kebahagiaan sendiri tidak bisa dilihat dari sisi ekonomi saja. Menurut Lagas *et al.* (2015): "*In order create economic growth, the strengthening of competitiveness is essen-*

tial; an important aspect of this competitiveness is the "quality of living". Todaro dan Smith (1994) menyebutkan bahwa menurut *United Nation Research Institute on Social Development (UNRISD)*, indikator kunci pembangunan sosial ekonomi terdiri atas 7 indikator ekonomi dan 9 indikator sosial. Indikator-indikator tersebut di antaranya adalah harapan hidup, kombinasi pendidikan dasar dan menengah, serta rata-rata jumlah orang per kamar. Menurut *Economics and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP, 2009)*, sebuah badan di bawah PBB, dalam tulisan yang berjudul *Gross National Happiness Index: Towards Measuring the Progress of Societies*, sistem statistik nasional harus menghasilkan statistik untuk memantau perhatian masyarakat seperti demokrasi, hak asasi manusia dan pemerintahan, pelanggaran terhadap anak dan perempuan, serta kontribusi wanita terhadap pertumbuhan ekonomi dan kebahagiaan.

Indeks

Menurut J. Supranto (2001), indeks adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur perubahan atau perbandingan variabel ekonomi/sosial, misalnya untuk mengukur perubahan tingkat produktivitas, pengangguran, gaji/upah, dan harga. Angka indeks bisa membandingkan dua variabel yang berbeda pada satu waktu atau membandingkan variabel yang sama pada waktu yang berbeda.

Menurut OECD (2008), indeks komposit adalah sekumpulan ekuitas, indeks, atau faktor lainnya yang dikombinasikan dengan cara standar, menyediakan ukuran statistik yang berguna dari pasar secara keseluruhan atau kinerja sektor dari waktu ke waktu. Indeks komposit dapat menyajikan berbagai informasi menjadi satu angka yang lebih ringkas sehingga mudah dalam analisis. Indeks komposit biasanya tersusun atas gabungan dari berbagai macam indeks. Menurut OECD (2008), langkah-langkah utama dalam menyusun indeks komposit adalah standarisasi, pembobotan, dan agregasi.

IPM dan IPR

IPM atau *Human Development Index (HDI)* merupakan suatu indeks komposit yang digunakan untuk ukuran pembangunan manusia. IPM ini ditetapkan oleh PBB secara standar agar dapat digunakan untuk membandingkan antar-wilayah atau antar-negara. Indeks ini dibentuk berdasarkan empat

indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan *output* dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak (BPS, 2008, 2010a). Menurut Nikolaev (2014): "*The HDI Human Development Index is an attempt to track the capabilities, or opportunities, that people have exercise their freedom to attain a better life*". Namun demikian, menurut Setiawan dan Hakim (2013) disebutkan bahwa PDB dan IPM tidak harus berjalan linier, karena peningkatan PDB tanpa disertai peningkatan pemerataan pendapatan juga tidak akan meningkatkan IPM.

Adanya keterbatasan yang dimiliki oleh IPM, salah satunya adalah belum mampu secara utuh mengukur kinerja pembangunan wilayah, memunculkan ide mengenai pengukuran pembangunan regional yang lebih luas. Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan ukuran yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Regional (IPR) yang mencoba mengukur kinerja pembangunan wilayah dari berbagai dimensi. Ada kaitan yang erat antara PDB dengan IPR seperti yang diungkapkan oleh Lagas *et al.* (2015): "*significant correlation is found between RQI Regional Quality of Living Indicator scores and the GDP per capita and population density*". Kajian awal mengenai IPR oleh BPS dilakukan pada tahun 2009 dan penyempurnaan penyusunan IPR dilakukan pada tahun 2010. IPR tersusun atas lima dimensi yang masing-masing dimensi terdiri dari beberapa sub-dimensi dan indikator. Dimensi pembentuk IPR adalah dimensi ekonomi, sosial, infrastruktur dan pelayanan publik, kualitas lingkungan hidup, serta dimensi teknologi, informasi, dan komunikasi.

Better Life Index OECD

OECD mempunyai beberapa dimensi yang digunakan untuk mengetahui kebahagiaan negara-negara anggotanya. Dimensi itu adalah dimensi pendapatan, perumahan, pekerjaan, kemasyarakatan, pendidikan, lingkungan, pemerintahan, kesehatan, kepuasan hidup, keamanan, serta keseimbangan waktu. Dimensi-dimensi ini dipilih karena sesuai dengan teori yang ada serta berdasarkan pengalaman OECD dalam meneliti keadaan ekonomi dan pembangunan negara-negara. Menurut Durand dan Smith (2013), "*the eleven dimensions BLI*

can be considered as universal, i.e. as possibly relevant to people living in all socialities. However, their relative importance will vary across individuals and countries". Suatu ukuran yang diperkenalkan OECD ini yang mencakup berbagai dimensi di atas dikenal dengan istilah *Better Life Index* (BLI). Ukuran ini setidaknya telah dipakai oleh 34 negara anggota OECD yang dapat dikatakan sebagian besar adalah negara-negara maju.

Setiap dimensi yang digunakan terdiri atas satu sampai tiga indikator yang berkaitan. Dimensi dan indikator tersebut adalah:

1. Dimensi perumahan menggunakan dua indikator, yaitu banyaknya kamar per kapita untuk mengukur apakah seseorang tinggal dalam kondisi hunian yang sesak, serta persentase rumah tangga yang mempunyai fasilitas buang air besar sendiri;
2. Dimensi pendapatan menggunakan dua indikator, yaitu rata-rata pendapatan disposabel rumah tangga dan rata-rata nilai aset finansial yang dimiliki rumah tangga;
3. Dimensi pekerjaan dalam konsep OECD ini terdiri dari dua indikator. Indikator yang pertama adalah angka penduduk bekerja yang merupakan lawan dari angka pengangguran terbuka dan indikator yang kedua adalah tingkat pengangguran jangka panjang yang didefinisikan oleh OECD adalah penduduk yang tidak bekerja setidaknya selama satu tahun;
4. Dimensi kemasyarakatan atau komunitas diukur melalui satu ukuran, yaitu banyaknya teman, tetangga, atau kerabat dekat lainnya yang bersedia memberi pertolongan jika penduduk dalam keadaan membutuhkan;
5. Dimensi pendidikan menggunakan dua indikator, yaitu tingkat pencapaian pendidikan dan kemampuan murid dalam hal membaca;
6. Dimensi lingkungan dilihat melalui tingkat pencemaran udara;
7. Dimensi pemerintahan dilihat dari dua indikator, yaitu angka partisipasi pemilihan umum serta angka transparansi dan keterbukaan pemerintahan dalam pembuatan peraturan;
8. Dimensi kesehatan tersusun atas angka harapan hidup dan laporan mengenai kesehatan penduduk secara umum;
9. Dimensi kepuasan hidup; OECD telah mengadakan survei tersendiri untuk mengetahui bagaimana seseorang mengevaluasi tentang kehidupannya secara umum berdasarkan pengalaman positif dan negatif yang telah dilalui;
10. Dimensi keamanan; OECD menggunakan pendekatan dengan ukuran tingkat penyerangan yang dialami penduduk dan tingkat pembunuhan setiap 100.000 penduduk;
11. Dimensi keseimbangan waktu terdiri dari tiga indikator. Indikator yang pertama adalah tingkat wanita yang mempunyai anak usia sekolah yang bekerja. Indikator yang kedua adalah persentase penduduk bekerja yang mempunyai jam kerja lama (lebih dari 50 jam seminggu) dan indikator yang ketiga adalah waktu yang dimiliki untuk memanjakan diri dan untuk waktu luang.

Better Life Index Indonesia

Konsep *Better Life Index* Indonesia pada umumnya mengadopsi dari konsep yang digunakan OECD. Namun, ada kalanya beberapa indikator yang digunakan OECD kurang relevan untuk digunakan di Indonesia sehingga dilakukan pendekatan atau penggunaan indikator yang lainnya. Menurut Durand dan Smith (2013) yakni "*The BLI has been designed to disseminate the result of how's life? To a wide audience and to involve people in the discussion on well-being*".

Pada dimensi perumahan, ukuran banyaknya kamar per kapita hanya banyak digunakan di negara-negara di Eropa. Untuk Indonesia sendiri mempunyai ukuran luas lantai per kapita yang digunakan BPS dalam melihat kondisi perumahan rumah tangga. Kedua ukuran tersebut pada hakekatnya mengukur hal yang sejalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, luas hunian per kapita yang layak huni adalah lebih dari 7,2 m².

Pada dimensi pendapatan, sangat sulitnya mendapatkan data tentang pendapatan rumah tangga membuat BPS menggunakan nilai pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan. Hal ini juga yang digunakan dalam konsep BLI Indonesia ini, yakni nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan daya beli.

Pada dimensi pekerjaan, tidak adanya data tentang pengangguran jangka panjang (minimal satu tahun menganggur) membuat peneliti melakukan pendekatan dengan persentase penempatan tenaga kerja terdaftar terhadap jumlah pencari kerja terdaftar dalam satu tahun yang merupakan data

dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) (BPS, 2010d).

Pada dimensi kemasyarakatan, Indonesia telah mempunyai ukuran yang serupa, yakni modal sosial. Namun, pada penelitian ini, data yang digunakan hanya sebagian dari indikator modal sosial terutama yang sesuai dengan konsep OECD, yakni yang berhubungan dengan banyaknya kerabat, tetangga, atau teman yang siap menolong jika dibutuhkan.

Pada dimensi pendidikan, angka melek huruf masih menjadi indikator yang fundamental meskipun ukuran ini hanya ukuran dasar dari kemampuan membaca. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tingginya bobot indikator ini pada aspek pendidikan dalam penghitungan IPM.

Untuk melihat dimensi lingkungan, penelitian ini menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (2010). Selain mencakup pencemaran udara yang sesuai dengan konsep OECD, indeks ini mencakup pencemaran air sungai dan luas tutupan hutan.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (BPS, 2009b) digunakan dalam dimensi pemerintahan. Selain karena mencakup angka partisipasi pemilu, IDI juga menggambarkan ukuran demokrasi yang mencerminkan keterbukaan dan transparansi pemerintahan. Dalam publikasi IDI, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang ditandai antara lain oleh adanya kebebasan yang diatur oleh undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada dimensi kesehatan, tingkat penduduk yang tidak mempunyai keluhan kesehatan merupakan indikator yang paling sesuai untuk proksi ukuran mengenai evaluasi penduduk tentang seberapa sehat mereka yang digunakan OECD.

Menilik dimensi kepuasan hidup, bahwa kepuasan hidup merupakan ukuran yang sangat sulit diukur dan sangat subyektif. Setiap individu mempunyai definisi yang berbeda tentang kepuasan hidupnya. Dalam teori psikologi, Maslow berpendapat bahwa seseorang akan mendapatkan kepuasan hidup jika kebutuhan hidupnya terpenuhi. Salah satu dari lima kebutuhan hidup menurut Maslow adalah kebutuhan ketentraman jaminan hidup yang di dalamnya mencakup adanya jaminan atau asuransi yang menanggung kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (Puradiredja, 2011). Di sisi lain, berwisata juga dapat menciptakan kepuasan hidup. Menurut James J. Spillane (1982: 20) dalam tesis

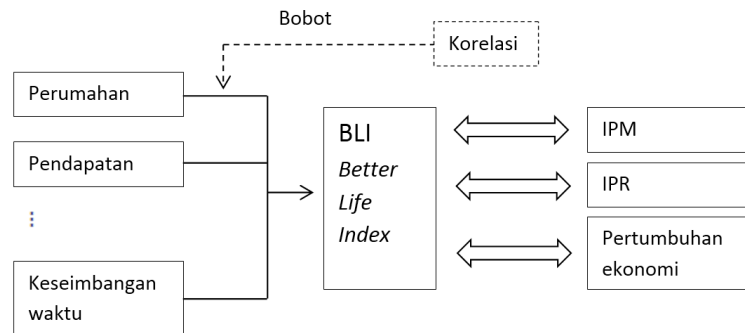
Achmad Agus Nasihuddin (2010), wisata merupakan kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan di antaranya adalah untuk mendapatkan kenikmatan dan mencari kepuasan. Berdasarkan hal-hal tersebut, jaminan atau asuransi kesehatan dan kegiatan wisata atau rekreasi dapat dijadikan indikator yang cukup bagi kepuasan hidup.

Kerangka Pikir

Adanya suatu ukuran statistik yang dikenalkan oleh OECD untuk mengukur tingkat kebahagiaan atau keberhasilan pembangunan negara anggotanya merupakan suatu hal yang perlu mendapat apresiasi positif. Ukuran ini tidak hanya mencakup dimensi ekonomi saja yang selama ini sering digunakan untuk tolak ukur keberhasilan pembangunan. Untuk itu, Indonesia yang merupakan negara berkembang yang telah cukup menunjukkan kemajuan ekonomi yang positif, perlu mencoba melihat keberhasilan pembangunannya dengan ukuran yang lebih kompleks dan relevan.

Dimensi-dimensi yang digunakan dalam BLI OECD sangat sesuai digunakan sebagai ukuran pembangunan yang sesuai dengan teori konseptual yang dijabarkan sebelumnya, yakni pembangunan yang multidimensional. Aspek pembangunan sosial dapat terwakili oleh dimensi perumahan, pekerjaan, kemasyarakatan, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, kepuasan hidup, keamanan, serta keseimbangan waktu. Aspek ekonomi terwakili oleh dimensi pendapatan yang terdiri dari indikator pendapatan/pengeluaran rumah tangga dan aset finansial (tabungan) rumah tangga. Selain aspek sosial dan ekonomi, BLI juga mencakup aspek yang menjadi isu hangat beberapa tahun belakangan, yakni aspek lingkungan.

Untuk mengukur BLI di Indonesia, peneliti menggunakan rujukan teori BLI dari konsep yang digunakan oleh OECD yang meliputi dimensi pendapatan, perumahan, pekerjaan, kemasyarakatan, pendidikan, lingkungan, pemerintahan, kesehatan, kepuasan hidup, keamanan, dan keseimbangan waktu. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini semaksimal mungkin menggunakan variabel yang sama persis. Namun, karena berbagai kondisi yang berbeda maka sebagian variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda tetapi tidak mengubah dari esensi atau maksud awal dari pemilihan variabel tersebut oleh OECD (masih mengukur hal yang sama). Dari dimensi-dimensi yang multidimensional akan terbentuk BLI dengan



Gambar 3: Kerangka Pikir Penelitian
Sumber: Diolah sebagai Kajian Teori

penimbang tertentu. Penentuan penimbang tertentu ini menggunakan analisis matriks korelasi. Setelah mendapatkan nilai BLI untuk Indonesia dan setiap provinsi di Indonesia, analisis dilanjutkan untuk mengetahui hubungan antara indeks ini dengan ukuran-ukuran sosial ekonomi yang sudah ada yakni IPM, IPR, dan pertumbuhan ekonomi. Selain untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan BLI dengan ukuran-ukuran tersebut, analisis ini juga sebagai kontrol untuk melihat validitas atau kesesuaian BLI.

Metode

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan dimensi yang digunakan oleh OECD untuk mengukur BLI di negar-negara anggotanya. Namun, secara operasional peneliti menggunakan beberapa variabel yang tidak sama persis tetapi tetap sejalan dan mengacu dengan konsep yang diberikan OECD. Sebagai contoh, variabel banyaknya kamar per kapita yang digunakan OECD didekati dengan variabel luas lantai per kapita, variabel mengenai kesehatan penduduk secara umum didekati dengan persentase penduduk yang tidak mempunyai keluhan kesehatan, serta variabel mengenai tingkat penyerangan dan pembunuhan per 100.000 penduduk didekati dengan persentase rumah tangga yang tidak menjadi korban kejahatan.

Semua data variabel yang digunakan merupakan data tahun 2009 sehingga angka yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah ukuran tahun 2009. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian

ini adalah:

Perumahan:

1. X_1 yaitu persentase rumah tangga yang memiliki luas hunian per kapita lebih besar 7,2 m²;
2. X_2 yaitu persentase rumah tangga yang mempunyai toilet sendiri.

Pendapatan:

1. X_3 yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan daya beli;
2. X_4 yaitu simpanan masyarakat per kapita.

Pekerjaan:

1. X_5 yaitu tingkat penduduk bekerja;
2. X_6 yaitu persentase penempatan tenaga kerja terdaftar.

Kemasyarakatan:

1. X_7 yaitu persentase rumah tangga yang saling tolong-menolong.

Pendidikan:

1. X_8 yaitu persentase penduduk yang memiliki ijazah minimal SMP;
2. X_9 yaitu persentase penduduk yang tidak buta huruf.

Lingkungan:

1. X_{10} yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pemerintahan:

1. X_{11} yaitu Indeks Demokrasi.

Kesehatan:

1. X_{12} yaitu angka harapan hidup;
2. X_{13} yaitu persentase penduduk yang tidak mempunyai keluhan kesehatan.

Kepuasan Hidup:

1. X_{14} yaitu persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata;

2. X_{15} yaitu persentase rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan.

Keamanan:

1. X_{16} yaitu persentase rumah tangga yang tidak menjadi korban kejahatan.

Keseimbangan Waktu:

1. X_{17} yaitu persentase penduduk bekerja yang bekerja lebih dari 50 jam seminggu.
2. X_{18} yaitu persentase kerja kepala rumah tangga (KRT) wanita/istri KRT dengan anak usia sekolah.
3. X_{19} yaitu rata-rata jam kerja per hari.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai instansi terkait seperti BPS, Kementerian Lingkungan Hidup, Kemenakertrans, serta Bank Indonesia. Secara ringkas mengenai metode pengumpulan data dapat dilihat melalui Tabel 1.

Susenas merupakan survei tahunan yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial ekonomi dengan cakupan relatif luas. Susenas pertama kali dilakukan pada tahun 1963. Pada *Susenas 2009*, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang ditujukan untuk individu, diusahakan agar individu yang bersangkutan yang menjadi responden. Sedangkan untuk pertanyaan yang ditujukan untuk rumah tangga dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan KRT, istri/suami KRT, atau anggota rumah tangga yang lainnya yang mengetahui karakteristik item yang ditanyakan.

Kerangka sampel yang digunakan dalam *Susenas 2009* terdiri dari tiga kerangka sampel, yaitu kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus, kerangka sampel untuk pemilihan sub-blok sensus (khusus untuk blok sensus yang memiliki muatan lebih dari 150 rumah tangga), dan kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga dalam blok sensus. Kerangka sampel blok sensus adalah daftar blok sensus biasa hasil sensus ekonomi tahun 2006 yang dilengkapi dengan jumlah rumah tangga hasil pencacahan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Kerangka sampel blok sensus ini mencakup blok sensus di 471 kabupaten/kota dan dibedakan berdasarkan perdesaan dan perkotaan. Pelaksanaan Susenas Juli 2009 mencakup 18.243 blok sensus atau 291.888 rumah tangga sampel yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia.

JEPI Vol. 16 No. 2 Januari 2016, hlm. 123–140

Kerangka sampel rumah tangga adalah daftar rumah tangga hasil pendaftaran rumah tangga dari kegiatan *listing*.

Data untuk dimensi perumahan pada penelitian ini menggunakan data yang diolah hasil Susenas. Data Susenas juga digunakan pada publikasi *Statistik Kriminal*, termasuk pada dimensi keamanan yang digunakan pada penelitian ini, bahwa data diambil dari publikasi *Statistik Kriminal 2011* yang diolah dari Susenas. Selain itu data Susenas juga digunakan pada dimensi kesehatan yaitu penduduk yang tidak mempunyai keluhan kesehatan.

Pada dimensi pekerjaan, variabel persentase penduduk bekerja masih menggunakan data Susenas sedangkan variabel tingkat penempatan tenaga kerja terdaftar merupakan pembagian antara jumlah penempatan tenaga kerja terdaftar dengan jumlah pencari kerja terdaftar yang merupakan data administrasi dari Kemenakertrans.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ukuran yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Indonesia. Indeks ini diadopsi dari konsep *Environmental Performance Index (EPI)* yang dikembangkan *Yale University* dan *Columbia University* yang berkolaborasi dengan *World Economic Forum* dan *Joint Research Center of the European Commission* (Kementerian Lingkungan Hidup, 2010). IKLH dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan program-program pengelolaan lingkungan. Indikator yang dipakai dalam indeks ini adalah kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Dalam pengukuran IKLH, ada beberapa provinsi yang nilai indeksnya diambil dari nilai indeks provinsi lainnya yang bersebelahan dikarenakan keterbatasan data. Jadi, pengukuran yang dilakukan pada provinsi tertentu dianggap mewakili provinsi tersebut dan provinsi sebelahnya. Provinsi-provinsi tersebut yaitu:

1. Provinsi Kepulauan Riau, mengikuti Provinsi Riau;
2. Provinsi Gorontalo, mengikuti Sulawesi utara;
3. Provinsi Sulawesi Barat, mengikuti Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Provinsi Maluku Utara, mengikuti Provinsi Maluku;
5. Provinsi Papua Barat, mengikuti Provinsi Papua.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan sebuah ukuran untuk melihat demokrasi melalui

Tabel 1: Sumber Data Penelitian

No. (1)	Data/variabel (2)	Sumber Instansi (3)	Keterangan (4)
1	Persentase rumah tangga dengan luas hunian per kapita lebih dari 7,2m ²	BPS	Website BPS ^a
2	Persentase rumah tangga yang mempunyai toilet sendiri	BPS	Statistik Indonesia 2010
3	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	BPS	IPM 2009
4	Simpanan masyarakat (rupiah dan valas) di bank umum dan BPR per kapita	Bank Indonesia	Website BI ^b
5	Tingkat penduduk bekerja	BPS	Statistik Indonesia 2010
6	Persentase penempatan tenaga kerja terdaftar	Kemenakertrans	
7	Persentase rumah tangga yang saling tolong-menolong	BPS	Susenas 2009 (Blok VII, r3-r9)
8	Persentase penduduk yang memiliki ijazah minimal SMP	BPS	Statistik Indonesia 2010
9	Angka melek huruf	BPS	IPM 2009
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan hidup	IKLH 2009
11	Indeks Demokrasi	BPS	Indeks Demokrasi 2009
12	Angka harapan hidup	BPS	IPM 2009
13	Persentase penduduk yang tidak mempunyai keluhan kesehatan	BPS	Statistik Indonesia 2010
14	Persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata	BPS	Susenas 2009
15	Persentase rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan	BPS	Susenas 2009
16	Persentase rumah tangga yang tidak menjadi korban kejahatan	BPS	Statistik Kriminal 2011
17	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja lebih dari 50 jam	BPS	Susenas 2009
18	Persentase bekerja dari KRT wanita/ istri KRT yang mempunyai anak usia sekolah	BPS	Susenas 2009
19	Rata-rata jam kerja per hari	BPS	Susenas 2009

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber, diolah

Keterangan: ^a *Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Luas Hunian per kapita $\leq 7,2 m^2$, 1993–2015*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1557>

^b *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI)*. Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/statistik/seki/terkini/moneter/Contents/Default.aspx>

tiga aspek penting: kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. IDI menyajikan gambaran kondisi demokrasi masing-masing provinsi berdasarkan indikator-indikator yang dikembangkan dari tiga aspek tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan IDI adalah metode *triangulation*, yakni mengombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi data yang dipakai dengan metode yang lain. Empat metode utama yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penyusunan IDI yaitu *review media* (analisis isi berita surat kabar), *review dokumen* (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara mendalam (*in-depth interview*).

Metode Analisis

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis untuk memberikan gambaran informasi dengan menyajikan tabel-tabel, diagram-diagram, dan gambar-gambar yang informatif. Analisis deskriptif akan menjelaskan bagaimana penimbang suatu dimensi dan indikator BLI terbentuk. Selain itu, analisis deskriptif juga menggambarkan kondisi atau posisi suatu provinsi berdasarkan nilai BLI yang terbentuk.

Analisis Korelasi

Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui keeratn hubungan antara dua variabel. Tingkat keeratn hubungan antar-variabel ini dinotasikan dengan ρ untuk keeratn populasinya dan r untuk estimasi nilai ρ . Nilai korelasi antara -1 sampai dengan 1 (Supranto, 2001). Analisis korelasi Pearson menunjukkan hubungan linier antara dua variabel. Formula penghitungan korelasi Pearson adalah:

$$r = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \sqrt{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}} \quad (1)$$

Pengujian hipotesisi tentang ρ dapat dituliskan seperti di bawah ini:

$$H_0 : \rho = 0$$

$$H_1 : \rho \neq 0$$

Statistik uji:

$$t_0 = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \quad (2)$$

Keputusan: tolak H_0 jika $|t_0| > t_{\alpha/2(n-2)}$

Penyusunan Indeks Komposit

Standarisasi

Standarisasi diperlukan pada data yang memiliki unit pengukuran yang berbeda. Metode standarisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode maksimum-minimum. Dalam metode ini seluruh data ditransformasi ke dalam sistem skor 0–100. Sebelum dilakukan standarisasi ini, semua variabel sudah dibuat sedemikian rupa agar mempunyai arah yang sama yaitu arah yang positif (makin besar nilainya, makin bagus). Metode maksimum-minimum yang digunakan adalah:

$$I_{in} = \frac{x_{in} - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \times 100 \quad (3)$$

dengan:

x_{min} : nilai minimum dari variabel tertentu;

x_{max} : nilai maksimum dari variabel tertentu;

x_{in} : nilai variabel pada suatu observasi.

Nilai minimum dan maksimum variabel yang digunakan dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.

Pembobotan

Penjelasan pembobotan mengacu pada pendapat Kasparian dan Rolland (2012), bahwa: "*The global index score of each country is obtained by a weighted mean of the scores of all criteria. The originality of OECD's BLI is to let the user choose its own weights*". Pembobotan dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi atau lebih tepatnya dalam bentuk matriks korelasi. Menurut BPS (2010c), penimbang yang ditentukan berdasarkan pada matriks korelasi diasumsikan proporsional (sebanding) dengan nilai absolut koefisien korelasi pada masing-masing baris atau kolom. Penimbang setiap variabel ditentukan dengan menghitung proporsi dari jumlah tiap-tiap baris/kolom terhadap jumlah keseluruhan. Dalam buku yang sama, yakni *Penyempurnaan Penyusunan Indeks Pembangunan Regional*, Ray (2006) dalam BPS (2010c) menyatakan bahwa asumsi yang mendasari

Tabel 2: Nilai Minimum dan Maksimum pada Setiap Variabel

Variabel (1)	Minimum (2)	Maksimum (3)	Keterangan (4)
Persentase rumah tangga dengan luas hunian per kapita	0	100	-
Persentase rumah tangga dengan fasilitas buang air besar (BAB) milik sendiri	0	100	-
Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	360.000	732.720	IPM 2008 dan 2009
Simpanan masyarakat per kapita di bank konvensional dan BPR	1.360.627,248	97.735.368,21	Data Empiris
Tingkat penduduk bekerja	0	100	-
Persentase penempatan tenaga kerja terdaftar	0	100	-
Persentase rumah tangga yang saling tolong-menolong	0	100	-
Persentase penduduk yang memiliki ijazah minimal SMP	0	100	-
Persentase penduduk yang melek huruf	0	100	-
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	0	100	-
Indeks Demokrasi	0	100	-
Angka harapan hidup	25	85	IPM 2008 dan 2009
Persentase penduduk yang tidak mempunyai keluhan kesehatan	0	100	-
Persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata	0	100	-
Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	0	100	-
Persentase rumah tangga yang tidak menjadi korban kejahatan	0	100	-
Persentase penduduk bekerja yang bekerja lebih dari 50 jam seminggu	0	100	-
Persentase KRT wanita/istri KRT dengan anak usia sekolah yang bekerja	0	100	-
Rata-rata selain jam kerja per hari	13	23	BPS, UU Tenaga Kerja

Sumber: Dirangkum dari berbagai sumber, diolah

bahwa sebuah variabel yang lebih penting akan memiliki jumlah koefisien korelasi lebih besar adalah sebuah asumsi yang masuk akal.

Sebagai contoh untuk mendapatkan penimbang variabel X_1 , dibentuk matriks korelasi seperti Tabel 3.

Tabel 3: Matrik Korelasi Antar-Variabel X_i

Nilai absolut korelasi	X_1	X_2	\dots	X_p	Jumlah
X_1	1	R_{12}	\dots	R_{1p}	T_1
X_2	R_{21}	1	\dots	R_{2p}	T_2
\vdots	\vdots	\vdots	\ddots	\vdots	\vdots
X_p	R_{p1}	R_{p2}	\dots	1	T_p
Jumlah	T_1	T_2	\dots	T_p	T

Sumber: BPS (2010)

Penimbang untuk variabel X_1 adalah $W_1 = T_1/T$. Sehingga dengan cara yang sama maka akan diperoleh penimbang setiap variabel.

Agregasi

Agregasi merupakan bagian yang cukup penting dalam membangun indeks komposit karena setelah melalui tahap agregasi akan terbentuklah nilai akhir suatu indeks. Metode agregasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah agregasi linier. Rumusan agregasi linier yang sering digunakan adalah penjumlahan pembobot dan nilai indikator

yang telah distandarisasi, yaitu:

$$BLI = \sum_{i=1}^p W_i I_i \tag{4}$$

dengan:

BLI : Better Life Index;

p : banyaknya variabel;

W_i : penimbang variabel ke- i ;

I_i : nilai variabel ke- i yang telah distandarisasikan.

Metode pembentukan indeks komposit dengan langkah-langkah di atas akan menghasilkan nilai indeks komposit yang tidak hanya dapat digunakan untuk membandingkan antar-wilayah tetapi juga dapat membandingkan antar-waktu. Hal tersebut karena standarisasi yang dilakukan menggunakan teknik minimum-maksimum yang nilai minimum dan maksimumnya telah ditetapkan. Selama bobot indikator yang digunakan masih sama, indeks ini dapat dibandingkan antar-waktu.

Hasil dan Analisis

Penentuan atau pembentukan penimbang pada indikator BLI menggunakan analisis matriks korelasi. Variabel yang dianalisis sebanyak 19 variabel. Penimbang yang diperoleh masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4: Penimbang Setiap Variabel

Variabel	Weight	Variabel	Weight
(1)	(2)	(3)	(4)
X ₁	0,047	X ₁₁	0,043
X ₂	0,070	X ₁₂	0,054
X ₃	0,053	X ₁₃	0,040
X ₄	0,055	X ₁₄	0,056
X ₅	0,050	X ₁₅	0,044
X ₆	0,043	X ₁₆	0,049
X ₇	0,049	X ₁₇	0,059
X ₈	0,063	X ₁₈	0,051
X ₉	0,053	X ₁₉	0,069
X ₁₀	0,052	TOTAL	1

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Berdasarkan Tabel 4, secara umum setiap variabel mempunyai bobot yang hampir sama yaitu sekitar 0,05. Hal tersebut memberikan informasi bahwa dalam proses pembangunan hendaknya memperhatikan semua variabel tersebut karena mempunyai tingkat kepentingan yang hampir sama. Sementara itu, untuk mendapatkan penimbang setiap variabel terhadap dimensi yang berkaitan dapat dilakukan dengan cara membagi penimbang variabel tersebut dengan jumlah penimbang variabel dalam satu dimensi yang sama. Sebagai contoh untuk mendapatkan penimbang variabel luas hunian per kapita terhadap dimensi perumahan maka dilakukan perbandingan yaitu $0,047 / (0,047 + 0,07) = 0,402$. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh indeks dimensi.

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut dari nilai-nilai indeks komposit yang diperoleh, dalam penelitian ini dilakukan pengategorian secara relatif yang dibuat peneliti terhadap nilai BLI menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Menggunakan asumsi nilai BLI mengikuti sebaran normal (simetri), maka pengategorian merujuk pada penggunaan formula selang keyakinan (*confidence interval*) dengan nilai tengah adalah rata-rata (μ), kemudian didapat nilai batas bawah dan nilai batas atas dengan besaran toleransi tergantung nilai simpangan baku (*standard deviation*) dikali konstanta k . Besaran konstanta k ditentukan melalui eksplorasi data yang berlaku umum atau simulasi berbagai nilai konstanta k , yaitu $k = 0,25$; $k = 0,5$, dan $k = 1$. Pada akhirnya menghasilkan suatu nilai konstanta k yang memadai yakni $k = 0,5$. Batasan pengategorian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Rendah → nilai indeks $< 57,9388$
2. Sedang → $57,9388 \leq$ nilai indeks $\leq 59,1222$
3. Tinggi → nilai indeks $> 59,1222$

Kategori "rendah" meliputi nilai BLI di bawah nilai batas bawah selang, dan kategori "tinggi" meliputi nilai BLI di atas nilai batas atas dalam selang keyakinan, dan di antara batas bawah sampai dengan nilai batas atas termasuk kategori "sedang". Sebagai catatan penting adalah untuk meningkatkan satu poin skor BLI membutuhkan usaha atau kebijakan program yang efektif dibandingkan meningkatkan satu poin IPM atau indeks komposit lainnya dengan jumlah dimensi lebih sedikit. Selain itu, kondisi provinsi-provinsi di Indonesia yang beraneka ragam dengan karakteristik daerahnya yang khas menjadikan suatu provinsi mempunyai keunggulan dalam satu atau beberapa dimensi sementara dimensi lainnya relatif kurang (Tabel 7) sehingga secara agregat nilai BLI relatif berdekatan.

Secara nasional, pencapaian BLI Indonesia hanya mencapai nilai 58,4246. Penulis menyadari bahwa kondisi Indonesia masih belum bisa dikatakan baik ditinjau dari ukuran ini. Dimensi-dimensi yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan BLI Indonesia adalah pendapatan, kemasyarakatan, dan kepuasan hidup. Nilai BLI Indonesia pada dimensi-dimensi tersebut berturut-turut adalah 39,44; 41,56; dan 20,84 (pencapaian indeks dimensi BLI dapat dilihat pada Tabel 7).

Ditinjau menurut provinsi, nilai BLI masing-masing provinsi dapat dilihat melalui Tabel 5. Ada sebelas provinsi yang mempunyai nilai BLI dengan kategori rendah atau di bawah rata-rata. Menduduki posisi indeks yang paling rendah di antara provinsi-provinsi Indonesia adalah Papua dengan BLI 53,0694. Papua yang sudah dikenal sebagai provinsi yang masih tertinggal tampaknya memang benar-benar perlu mendapat perhatian. Daerah tertinggal lainnya, yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), mempunyai nilai BLI 54,9930. Angka ini menempatkan NTB ke dalam dua provinsi dengan nilai BLI terendah.

Di sisi lain, meskipun provinsi Banten dan Jawa Timur berada di Pulau Jawa yang merupakan pulau yang menjadi pusat pembangunan, kedua provinsi ini masuk dalam kategori nilai BLI rendah. Nilai BLI untuk Banten dan Jawa Timur masing-masing adalah 56,9849 dan 57,4523. Walaupun Provinsi Jawa Timur yang termasuk provinsi maju, bahkan di dalamnya terdapat kota metropolitan, Surabaya, ternyata memiliki nilai indeks rendah dalam dimensi pendidikan, pemerintahan, dan keseimbangan waktu hidup. Dari dimensi komponen penyusun IPM pun, angka melek huruf, dan lama sekolah, Provinsi Jawa Timur ternyata mempunyai

Tabel 5: Nilai *Better Life Index* untuk Masing-masing Provinsi berdasarkan Kategori Indeks

Kategori					
Rendah		Sedang		Tinggi	
Provinsi	Nilai BLI	Provinsi	Nilai BLI	Provinsi	Nilai BLI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Papua	53,0694	Bali	57,6508	Lampung	59,7155
Nusa Tenggara Barat	54,9930	Sulawesi Tenggara	57,6515	Kep. Riau	59,9525
Gorontalo	56,2932	Maluku Utara	57,8045	Jambi	59,9816
Kalimantan Selatan	56,5207	Jawa Barat	58,2344	Bengkulu	60,0817
Banten	56,9849	Papua Barat	58,3575	Sumatera Selatan	60,6725
Sulawesi Barat	57,2791	Kalimantan Tengah	58,3688	Riau	61,2275
Nusa Tenggara Timur	57,3107	Jawa Tengah	58,4734	Sulawesi Utara	61,7402
Maluku	57,3613	Sumatera Barat	58,6026	Kalimantan Timur	61,9955
Jawa Timur	57,4523	Sulawesi Selatan	58,6273	DKI Jakarta	63,1248
Sulawesi Tengah	57,5377	DI Yogyakarta	58,9519		
Kalimantan Barat	57,5393	Kep. Bangka Belitung	59,2247		
		Sumatera Utara	59,2610		
		Aceh	59,4644		

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

nilai yang lebih rendah dari nilai nasional, bahkan daerah yang dikenal sebagai daerah tapal kuda (Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi) keadaannya sangat berbeda dengan daerah lain. Sementara Provinsi Banten mempunyai nilai BLI rendah dikarenakan pada dimensi pendapatan, kemasyarakatan, kesehatan, dan keamanan mempunyai nilai indeks yang rendah, termasuk juga pada dimensi lingkungan. Berdasarkan nilai IKLH, Provinsi Banten hanya mempunyai nilai IKLH sebesar 50,86.

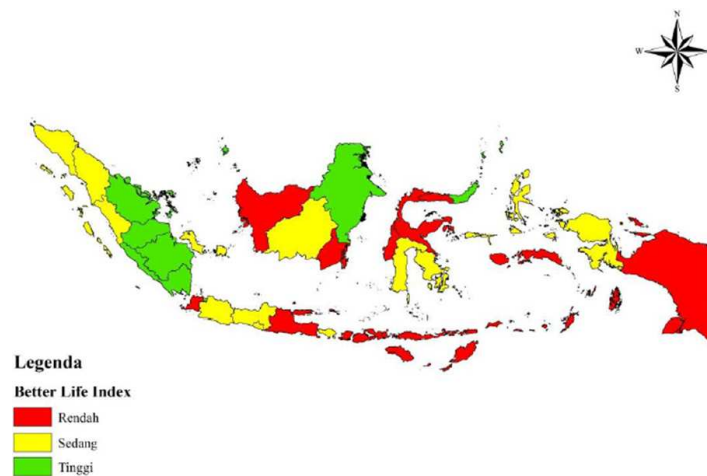
Selain empat provinsi yang disebutkan sebelumnya, beberapa provinsi berikut juga masuk dalam kategori nilai BLI rendah, yakni Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Berdasarkan analisis deskriptif secara umum terhadap dimensi-dimensi pada provinsi-provinsi yang mempunyai nilai BLI rendah, ditemukan beberapa dimensi yang hampir di setiap provinsi tersebut masih rendah. Dimensi-dimensi tersebut adalah kesehatan, perumahan, dan pendidikan.

Provinsi Papua Barat yang termasuk provinsi bagian timur Indonesia mampu mengalahkan provinsi tetangganya yaitu Provinsi Papua dalam hal BLI. Provinsi Papua Barat mempunyai nilai BLI sebesar 58,3575. Provinsi ini mampu mewujudkan pembangunan kualitas hidup yang hampir dapat disejajarkan dengan DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dalam kategori BLI sedang bersama provinsi-provinsi lain, yakni Bali, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Be-

litung, Sumatera Utara, dan Aceh. Setidaknya ada tiga dimensi BLI yang baik pada Provinsi Papua Barat, yaitu dimensi lingkungan, kepuasan hidup, dan keseimbangan waktu.

Pada kelompok provinsi dengan BLI sedang, analisis deskriptif secara umum pada dimensi-dimensi BLI menghasilkan informasi bahwa dimensi lingkungan, pemerintahan, dan kemasyarakatan merupakan dimensi dengan nilai indeks dimensinya rendah. Peningkatan atau perbaikan kondisi dimensi-dimensi itu dapat meningkatkan BLI pada kelompok provinsi tersebut menjadi kategori tinggi.

Kelompok provinsi dengan BLI tinggi sebagian besar adalah provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini bisa kita sadari mengingat Pulau Sumatera juga merupakan pulau yang menjadi orientasi pembangunan setelah Pulau Jawa. Sementara itu, beberapa provinsi lainnya yang memiliki nilai BLI tinggi tersebar di beberapa pulau, yakni Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Peringkat pertama BLI dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dengan nilai BLI 63,1248. Beberapa dimensi penyusun BLI dikuasai oleh Provinsi DKI Jakarta seperti pendapatan, pendidikan, dan pemerintahan sehingga sangat kontributif terhadap nilai BLI DKI Jakarta yang tinggi. Namun demikian, dimensi lingkungan Provinsi DKI Jakarta merupakan angka yang paling rendah di Indonesia mengingat aktivitas ekonomi yang tinggi ditambah tingkat kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pencemaran yang tinggi. Di samping itu, Provinsi Kalimantan Timur cukup bagus di sebagian besar dimensi terutama dimensi pendapatan,



Gambar 4: *Better Life Index* Setiap Provinsi di Indonesia
Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

perumahan, dan kesehatan sehingga mampu mendukung pencapaian BLI sebesar 61,9955. Di Provinsi Sulawesi Utara, pada dimensi kemasyarakatan, pendidikan, dan lingkungan mempunyai nilai indeks yang tinggi, bahkan indeks lingkungan Provinsi Sulawesi Utara merupakan indeks lingkungan tertinggi di Indonesia, sehingga tidak mengherankan Provinsi Sulawesi Utara mempunyai kategori BLI yang tinggi dengan nilai BLI 61,7402.

Sebagai ukuran yang baru, tentunya keberadaannya perlu dilakukan tes validitas atau kontrol dengan ukuran yang telah terbukti memadai dan telah digunakan. Menurut Saifuddin Azwar (1997) untuk mengetahui validitas alat ukur baru dapat digunakan validitas konkuren dengan cara menghitung korelasi antara alat ukur yang baru tersebut dengan ukuran yang menjadi kriteria, yakni ukuran eksternal yang telah dianggap valid. Untuk melakukan hal itu, analisis korelasi dilakukan terhadap BLI dengan nilai IPM dan IPR.

Korelasi antara nilai BLI dengan IPM cukup kuat dan positif. Hasil *output* pengolahan menggunakan SPSS menunjukkan nilai korelasi BLI dengan IPM adalah 0,855. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam BLI juga mencakup beberapa dimensi ekonomi dan sosial, termasuk sebagian yang terdapat dalam IPM. Tentu saja karena keterbatasan IPM yang tidak mencakup dimensi-dimensi lain yang ada dalam BLI, membuat BLI lebih kompleks dalam mengukur keberhasilan pembangunan. Analisis korelasi ini telah membuktikan bahwa ukuran BLI mempunyai validitas yang tinggi.

Hubungan yang positif juga terjadi antara BLI dengan IPR. Hal ini mengindikasikan secara umum ada kecenderungan bahwa, semakin tinggi nilai IPR suatu daerah semakin tinggi pula nilai BLI-nya. Hasil pengolahan SPSS menunjukkan bahwa korelasi BLI dengan IPR adalah 0,575. Hasil ini sekaligus mendukung bahwa BLI merupakan ukuran yang valid digunakan di Indonesia.

Sementara itu, hasil yang menarik diperoleh saat menganalisis hubungan BLI dengan pertumbuhan ekonomi yang diukur dari pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan. Analisis korelasi menunjukkan bahwa BLI mempunyai keeratan hubungan yang negatif atau berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi. Nilai korelasi tersebut adalah -0,585. Fakta ini dapat mendukung latar belakang penelitian ini bahwa aspek material (pendapatan/pengeluaran/ produksi) tidak menjamin aspek-aspek atau dimensi pembangunan yang lainnya. Bahkan jika pembangunan hanya berfokus pada ekonomi tidak menutup kemungkinan justru akan mendapat hasil yang kurang baik pada aspek yang lainnya atau pertumbuhan ekonomi dimaksud dapat dikatakan sebagai *pseudo-growth*. Hasil ini senada dengan Boris Nikolaev (2014): "*GDP is poor measure for quality of life because it fails to account for the crucial dimension of psychological well-being*". Ini senada dengan rekomendasi *The OECD's Better Life Initiative (2011) –The Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission*: "*The recommendations made by this Commission sought to address concerns that standard macroeconomic statistics like GDP failed to give a true account of peo-*

ple's current and future well-being". Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bukanlah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi pertumbuhan ekonomi yang optimal dengan dibarengi pembangunan pada dimensi lain. Dengan kata lain, untuk mengukur pembangunan yang dimensional tidak tepat jika menggunakan ukuran pertumbuhan ekonomi (yang masih *univariate dimension*, yakni ekonomi), tapi sebaiknya menggunakan BLI yang meliputi dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain-lain.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis yang dilakukan, peneliti dapat mengambil beberapa simpulan berikut ini. *Pertama*, dalam penentuan BLI di Indonesia, sebagian besar variabel mempunyai penimbang yang relatif hampir sama, yakni sekitar 0,05, yang berarti bahwa semua variabel mempunyai tingkat kepentingan yang relatif sama. Secara umum, hasil penyusunan BLI ini dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan keberhasilan pembangunan antar-wilayah maupun antar-waktu. *Kedua*, pencapaian pembangunan dengan ukuran BLI untuk nasional Indonesia adalah 58,4246. Berdasarkan BLI tiap provinsi, lima provinsi dengan BLI tertinggi adalah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Riau, dan Sumatera Selatan sedangkan lima provinsi dengan BLI terendah adalah Papua, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Banten. *Ketiga*, BLI mempunyai hubungan yang cukup kuat dan positif dengan IPM dan IPR, akan tetapi memiliki keeratan hubungan yang negatif dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa BLI cukup valid digunakan sebagai ukuran pembangunan yang bersifat multidimensional di Indonesia.

Berdasarkan simpulan yang diutarakan sebelumnya, saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, pembangunan hendaknya dilakukan dengan memberikan perhatian secara merata pada semua dimensi pembangunan, tetapi perlu adanya prioritas terhadap dimensi-dimensi pembangunan yang memiliki indeks dimensi rendah. Secara nasional, dimensi-dimensi pembangunan yang perlu mendapat prioritas dari pemerintah berdasarkan penelitian ini adalah dimensi pendapatan, kemasyarakatan, dan kepuasan hidup. *Kedua*, kelompok provinsi dengan kategori

BLI rendah seperti Papua, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Banten tentu perlu mendapat prioritas dalam peningkatan pembangunan. Lebih khusus lagi pada kelompok provinsi dengan BLI rendah ini, pembangunan dapat diprioritaskan pada dimensi kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Sementara itu, pada kelompok provinsi dengan BLI sedang, pemerintah dapat memberi prioritas pembangunan pada dimensi lingkungan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.

Ketiga, pemerintah, baik pusat maupun daerah, diharapkan mempertimbangkan BLI ini sebagai alternatif ukuran pembangunan yang multidimensional. Dan *keempat*, mengingat bahwa penentuan BLI ini masih sangat tergantung ketersediaan data variabel-variabel penyusunannya, perlu diperhatikan untuk menggunakan pendekatan variabel lain yang lebih terjamin ketersediaan datanya secara rutin apabila ada variabel yang tidak bisa diperoleh setiap tahun, misalnya variabel Indeks Demokrasi dapat dilakukan pendekatan dengan data persepsi masyarakat terhadap pemerintahan dari Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Daftar Pustaka

- [1] Arham, M. A. (2014). Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Pergeseran Sektoral, dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14(2), 145–167.
- [2] Azwar, Saifuddin. (1997). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Badruddin, S. (2009, 19 Maret). *Teori dan Indikator Pembangunan*. Diakses dari <http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/>. Tanggal akses 19 April 2012.
- [4] BPS. (2008). *Indeks Pembangunan Manusia 2006–2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [5] BPS. (2009a). *Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [6] BPS. (2009b). *Indeks Demokrasi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [7] BPS. (2010a). *Indeks Pembangunan Manusia 2008–2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [8] BPS. (2010b). *Indikator Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [9] BPS. (2010c). *Penyempurnaan Penyusunan Indeks Pembangunan Regional*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [10] BPS. (2010d). *Statistik Indonesia 2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [11] BPS. (2010e). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [12] BPS. (2011). *Statistik Indonesia 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- [13] Durand, M., & Smith, C. (2013). The OECD Better Life Initiative: How's Life? and the Measurement of Well-Being.

Tabel 6: Matriks Korelasi Antar-Variabel

Korelasi	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀	X ₁₁	X ₁₂	X ₁₃	X ₁₄	X ₁₅	X ₁₆	X ₁₇	X ₁₈	X ₁₉
X ₁	1	0,401	0,525	-0,290	-0,062	0,260	0,163	0,096	0,330	-0,240	-0,060	0,198	0,225	0,250	-0,250	0,434	-0,300	0,095	-0,210
X ₂	0,401	1	0,448	0,338	-0,315	0,380	-0,360	0,523	0,410	-0,490	0,316	0,627	0,241	0,360	-0,250	0,368	-0,380	0,388	-0,490
X ₃	0,525	0,448	1	0,054	-0,095	0,428	0,025	0,183	0,120	-0,390	0,106	0,295	0,016	0,530	-0,430	0,282	-0,560	0,180	-0,480
X ₄	-0,290	0,338	0,054	1	-0,361	0,036	-0,550	0,637	0,200	-0,360	0,245	0,369	-0,020	0,500	-0,180	0,098	-0,340	0,249	-0,520
X ₅	-0,060	-0,320	-0,100	-0,360	1	-0,130	0,343	-0,530	-0,510	0,242	-0,120	-0,100	-0,160	-0,340	0,0250	-0,020	0,370	-0,640	0,415
X ₆	0,260	0,380	0,428	0,036	-0,125	1	-0,150	-0,070	0,150	-0,410	0,314	0,124	0,212	0,200	-0,470	0,239	-0,160	0,035	-0,170
X ₇	0,163	-0,360	0,025	-0,550	0,343	-0,150	1	-0,340	-0,020	0,491	-0,190	-0,260	-0,300	-0,310	0,109	-0,320	0,090	-0,220	0,348
X ₈	0,096	0,523	0,183	0,637	-0,532	-0,070	-0,340	1	0,530	-0,170	0,118	0,586	0,247	0,390	-0,220	0,330	-0,390	0,292	-0,560
X ₉	0,331	0,409	0,123	0,203	-0,512	0,154	-0,020	0,526	1	-0,150	0,456	0,258	0,150	0,090	-0,200	0,313	-0,300	0,599	-0,320
X ₁₀	-0,240	-0,490	-0,390	-0,360	0,242	-0,410	0,491	-0,170	-0,020	1	-0,260	-0,150	-0,020	-0,400	0,104	-0,170	0,230	-0,290	0,404
X ₁₁	-0,060	0,316	0,106	0,245	-0,116	0,314	-0,190	0,118	0,460	-0,260	1	0,345	-0,030	-0,140	-0,140	0,181	-0,230	0,404	-0,310
X ₁₂	0,198	0,627	0,295	0,369	-0,101	0,124	-0,260	0,586	0,260	-0,150	0,345	1	0,292	0,270	-0,220	0,407	-0,200	0,100	-0,370
X ₁₃	0,225	0,241	0,016	0,369	-0,020	0,212	-0,300	0,247	0,150	-0,020	-0,030	0,292	1	-0,210	-0,410	0,669	0,214	0,075	0,094
X ₁₄	0,250	0,360	0,530	0,500	-0,340	0,200	-0,470	0,390	0,090	-0,400	-0,140	0,265	-0,210	1	-0,250	-0,020	-0,480	0,162	-0,550
X ₁₅	-0,250	-0,430	-0,180	0,025	-0,180	-0,470	0,109	-0,220	-0,200	0,104	-0,140	-0,220	-0,410	-0,250	1	-0,440	0,093	0,095	0,153
X ₁₆	0,434	0,368	0,282	0,098	-0,020	0,239	-0,320	0,330	0,310	-0,170	0,181	0,407	0,669	-0,020	-0,440	1	-0,100	0,139	-0,160
X ₁₇	-0,300	-0,380	-0,560	-0,340	0,370	-0,160	0,090	-0,390	-0,300	0,230	-0,230	-0,200	0,214	-0,480	0,093	-0,100	1	-0,480	0,904
X ₁₈	0,095	0,388	0,180	0,249	-0,635	0,035	-0,220	0,292	0,600	-0,290	0,404	0,100	0,075	0,160	0,095	0,139	-0,480	1	-0,450
X ₁₉	-0,210	-0,490	-0,480	-0,520	0,415	-0,170	0,348	-0,560	-0,320	0,404	-0,310	-0,370	0,094	-0,550	0,153	-0,160	0,904	-0,450	1

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

Tabel 7: Indeks Dimensi Menurut Provinsi

No	Provinsi	PERUM		PENDAP		PEKERJ		MASY		PENDID		LINGK		PEMER		KESH		KEPUAS		KEAM		SEIMB	
		Nilai	R.	Nilai	R.	Nilai	R.	Nilai	R.	Nilai	R.	Nilai	R.	Nilai	R.	Nilai	R.	Nilai	R.	Nilai	R.	Nilai	R.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Aceh	67,60	22	34,33	28	45,42	32	39,45	26	71,85	6	72,47	13	66,29	23	69,28	21	31,59	2	98,34	2	60,96	3
2	Sumatera Utara	77,15	7	39,40	8	63,84	13	45,38	16	72,24	4	62,48	21	60,20	32	72,63	7	16,91	31	97,18	15	55,27	25
3	Sumatera Barat	65,05	25	37,39	13	59,73	23	46,21	14	70,89	8	87,04	3	60,29	31	69,84	18	21,04	16	97,46	12	54,20	30
4	Riau	83,38	1	39,61	7	68,34	8	42,33	19	72,04	5	51,65	27	75,85	2	74,12	3	16,52	32	97,92	6	60,56	5
5	Jambi	74,20	10	37,18	17	68,31	9	40	22	67,13	14	75,04	10	71	11	73,38	4	14,42	33	97,89	7	60,20	7
6	Sumatera Selatan	70,57	16	37,11	18	97,90	1	51,95	8	66,73	17	69,30	15	72,52	6	71,34	12	17,64	26	97,26	14	57,60	15
7	Bengkulu	73,87	11	35,73	23	55,17	28	56,59	5	68,84	11	79,58	5	64,76	25	71,89	10	20,52	18	96,66	21	57,19	16
8	Lampung	80,93	3	34,41	27	59,74	22	56,97	4	65,70	20	73,74	11	67,47	18	68,98	22	17,58	29	96,50	22	56,75	19
9	Kep. Bangka Belitung	77,29	6	39,69	6	69,17	7	41,18	20	65,59	22	52,15	26	67,01	20	66,13	28	25,47	7	96,77	20	58,54	13
10	Kep. Riau	80,47	4	42,29	3	64,82	11	40,23	21	69,27	10	51,65	28	73,61	4	69,59	20	25,46	8	97,81	8	54,77	26
11	DKI Jakarta	73,26	13	86,10	1	62,05	18	18,48	33	82,05	1	41,73	33	73,91	3	72,91	6	19,63	20	97,17	16	54,29	29
12	Jawa Barat	73,87	12	36,78	21	76,88	3	35,01	30	66,17	19	49,69	30	71,07	10	70	16	20,65	17	96,37	24	58,05	14
13	Jawa Tengah	76,47	8	37,35	14	77,80	2	45,77	15	61,07	28	55,40	24	66,45	22	73	5	22,77	14	97,68	10	53,05	31
14	DI Yogyakarta	79,50	5	40	4	62,87	17	49,77	9	71,19	7	53,52	25	67,55	17	71,08	13	23,64	11	95,52	30	49,16	32
15	Jawa Timur	75,22	9	39,01	9	63,46	14	39,50	25	61,62	27	59,01	23	62,49	29	71,37	11	18,92	24	97,32	13	54,43	28
16	Banten	69,86	19	36,83	20	63,19	16	35,13	29	68,03	12	50,86	29	67,98	16	64,56	29	22,91	12	95,76	27	58,75	11
17	Bali	70,29	17	39,83	5	60,71	20	45,23	17	65,06	24	85,50	4	70,35	13	69,96	17	17,58	28	97,96	5	46,47	33
18	Nusa Tenggara Barat	52,31	31	36,84	19	57,32	27	64,48	1	55,77	32	73,69	12	58,12	33	60,94	33	26,43	6	93,99	31	54,75	27
19	Nusa Tenggara Timur	61,83	26	32,34	32	64,51	12	49,66	10	55,88	31	66,61	20	71,64	9	62,91	30	31,88	1	92,88	33	60,95	4
20	Kalimantan Timur	68,91	20	37,29	15	69,62	5	37,11	28	59,55	29	71,92	14	72,38	7	68,19	23	17,60	27	98,09	3	56,76	18
21	Kalimantan Barat	66,80	24	37,27	16	63,41	15	42,46	18	67,04	15	45,70	32	77,63	1	74,76	1	19,09	22	98,72	1	59,70	8
22	Kalimantan Tengah	71,02	15	38,16	10	69,42	6	39,92	24	65,39	23	48,25	31	66,63	21	61,27	32	18,88	25	96,21	26	56,52	21
23	Kalimantan Selatan	81,13	2	42,78	2	74,61	4	33,89	31	72,77	3	68,63	16	72,31	8	74,31	2	24,86	9	97,66	11	56,47	22
24	Kalimantan Timur	70,21	18	37,43	12	53,99	29	58,31	2	73,30	2	88,21	1	70,94	12	72,44	8	19,40	21	96,23	25	62,43	1
25	Sulawesi Utara	60,63	28	35,86	22	61,30	19	55,83	6	66,45	18	68,51	17	66,02	24	66,14	27	18,93	23	97,12	18	58,60	12
26	Sulawesi Tengah	71,46	14	37,90	11	57,85	25	39,97	23	61,71	26	67,62	18	61,48	30	71,96	9	24,52	10	97,13	17	60,51	6
27	Sulawesi Selatan	68,56	21	34,09	31	59,82	21	46,73	13	65,61	21	60,53	22	64,29	26	68,06	24	26,98	5	96,89	19	55,63	23
28	Tenggara	50,99	32	34,78	25	45,80	31	57,71	3	62,91	25	88,21	2	73,50	5	61,66	31	27,24	4	93,94	32	55,30	24
29	Gorontalo	61,59	27	35,69	24	57,85	26	54,44	7	59,29	30	67,62	19	67,99	15	67,14	26	22,41	15	97,97	4	59,36	9
30	Sulawesi Barat	57,34	30	34,20	30	52,60	30	49,50	11	70,15	9	78,80	6	69,07	14	67,50	25	22,79	13	95,75	28	57,12	17
31	Maluku	59,40	29	32,12	33	65,91	10	49,42	12	67,46	13	78,8	7	67,21	19	69,77	19	17,44	30	97,77	9	58,93	10
32	Maluku Utara	67,05	23	34,21	29	35,62	33	37,39	27	66,88	16	75,30	8	63,06	28	71,07	14	30,40	3	96,38	23	61,30	2
33	Papua Barat	45,63	33	34,64	26	58,51	24	26,72	32	54,37	33	75,30	9	63,80	27	70,02	15	19,91	19	95,68	29	56,69	20
NASIONAL		73,07		39,44		65,14		41,56		65,53		59,79		67,30		70,55		20,84		96,92		56,23	

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis

- Paper Prepared for the International Association for Research in Income and Wealth (IARIW) Session at the 2013 World Statistics Conference, Sponsored by the International Statistical Institute, Hong Kong, August 26, 2013. Diakses dari <http://www.iariw.org/papers/2013/DurandPaper.pdf>. Tanggal akses 4 September 2012.*
- [14] ESCAP. (2009). Gross National Happiness Index: Towards Measuring the Progress of Societies. *Paper, E/ESCAP/CST/INF/21*. Committee on Statistics, Economics and Social Commission for Asia and the Pacific. Diakses dari <https://www.unescap.org/sites/default/files/pre-ods/CST1-INF21.pdf>. Tanggal akses 19 April 2012.
- [15] Kasparian, J., & Rolland, A. (2012). OECD's 'Better Life Index': Can Any Country be Well Ranked?, *Journal of Applied Statistics*, 39(10), 2223–2230.
- [16] Kementerian Lingkungan Hidup. (2010). *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2009*. Jakarta: Asisten Deputi Urusan Data dan Informasi Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup. Diakses dari <http://datin.menlh.go.id/assets/berkas/IKLH-2009-.pdf>. Tanggal akses 19 April 2012.
- [17] Lagas, P., van Dongen, F., van Rijn, F., & Visser, H. (2015). Regional Quality of Living in Europe. *Region: The Journal of ERSA*, 2(2), 1–26.
- [18] Lisna, V., Sinaga, B. M., Firdaus, M., Sutomo, S. (2013). Dampak Kapasitas Fiskal terhadap Penurunan Kemiskinan: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14(1), 1–26.
- [19] Nasihuddin, A. A. (2010). Pusat Wisata Kuliner di Kabupaten Lamongan: Tema Eklektik Bahari. *Undergraduate thesis*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- [20] Nikolaev, B. (2014). Economic Freedom and Quality of Life: Evidence from the OECD's Your Better Life Index. *Journal of Private Enterprise*, 29(3), 61–96.
- [21] OECD. (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. Diakses dari <http://www.oecd.org/std/leading-indicators/42495745.pdf>. Tanggal akses 4 September 2012.
- [22] Puradiredja, H. (2011, 19 Januari). *Pandangan Arti Kebahagiaan dan Kepuasan Hidup Barat dan Timur*. Kompasiana.com. Diakses dari <http://filsafat.kompasiana.com/2011/01/19/pandangan-arti-kebahagiaan-dan-kepuasan-hidup-barat-dan-timur/>. Tanggal akses 23 Mei 2012.
- [23] Setiawan, M. B., & Hakim, A. (2013). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, 9(1), 18–26.
- [24] Supranto, J. (2001). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- [25] Todaro, M. P. & Smith, S. C. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.